



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SITI SURYATI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **80353**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.720.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 572 m2/200 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 762 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/130 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 473.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT PX MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 67.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 315.720.467****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 4.576.220.467**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.576.220.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.